

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi ruang vital yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sebagai arena kritis di mana masyarakat secara kolektif mengartikulasikan suara, kritik, dan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Melihat kondisi Indonesia sekarang, seringkali masyarakat melakukan serangkaian aksi yang lebih modern seperti melibatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan media sosial memiliki potensi besar untuk menggerakkan partisipasi demokrasi dengan mempererat interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, potensi ini tidak otomatis terwujud tanpa pengelolaan komunikasi yang transparan dan responsif (Bertot et al., 2012).

Penggunaan media sosial saat ini semakin meningkat secara signifikan, baik dari segi jumlah pengguna maupun intensitas aktivitasnya. Platform-platform media sosial telah menjadi ruang yang ramai dan dinamis, di mana jutaan orang berinteraksi setiap hari. Media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan sudah bertransformasi menjadi alternatif utama dalam komunikasi modern. Media sosial yang sangat populer diantaranya adalah Instagram, TikTok, YouTube, Platfrom X, dan masih banyak lagi. Dimana Platform X menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan, karena bersifat terbuka dan transparan dalam mengemukakan opini publik dan seruan yang menggunakan tagar.

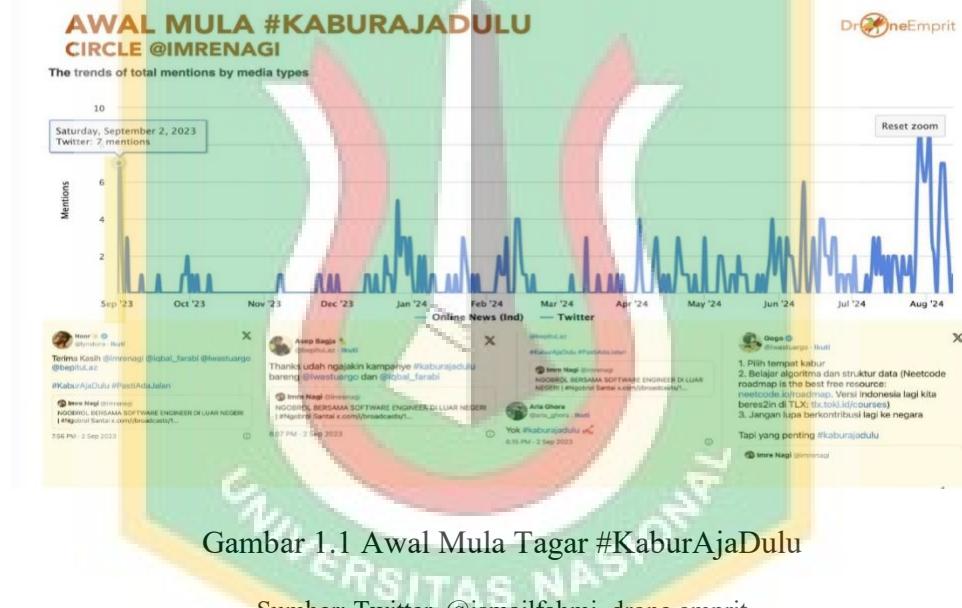
Platform X memperkaya pengakumulasi tagar yang dikenal sebagai *hashtag activism*, *Hashtag activism* atau aktivisme tagar merupakan bentuk perjuangan sosial yang memanfaatkan media sosial, khususnya lewat penggunaan tagar, untuk menyebarkan kesadaran, menggalang dukungan, serta membuka ruang diskusi mengenai berbagai masalah sosial (Bate & Amrullah, 2024), seperti yang marak belakangan ini, tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu menjadi senjata masyarakat untuk menolak kebijakan-kebijakan dan situasi yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2025, kedua tagar ini hadir di platform X sebagai simbol

dan medium partisipasi publik yang memiliki pesan simbolik di dalamnya atas keresahan yang mereka rasakan. Maka tagar #KaburAjaDulu merupakan seruan generasi muda di Indonesia untuk pergi mencari kehidupan yang lebih layak di luar negeri, imbas dari sempitnya kesempatan untuk melangkah lebih maju di dalam negeri sendiri. Secara umum tagar ini di representasikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas kondisi dan kebijakan yang tidak memihak kepada mereka. Tagar #KaburAjaDulu tak hanya hadir sebagai tren digital, tetapi menjadi bentuk protes, pesismisme, ancaman, dan *hopeless mentality* pada generasi muda di Indonesia saat menghadapi situasi nasional.

Namun tagar ini sebetulnya sudah di gerakkan pada September 2023 oleh @imrenagi yang memberikan ujaran protes dan ekspresi kekecewaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi di dalam negeri melalui *podcast* bersama *engineer* di luar negeri, begitu juga ia memberikan rencana motivasi ‘kabur’ demi masa depan yang lebih baik. Dalam artikel Universitas Muhammadiyah Surakarta menyebutkan tagar ini eksis dikalangan *programmer* atau *tech-bross* yang mengalami *Tech Winter*, yaitu suatu kondisi penurunan signifikan investasi dan aktivitas bisnis di sektor teknologi, terutama pada perusahaan *Start Up* (Universitas Muhammadiyah Surabaya, n.d.). Di tahun 2024 pula tagar ini masih terus hadir dengan isu sosial, ekonomi, politik yang memuncak setelah pemilu 2024 dianggap semakin buruk dan tak ada harapan. Masyarakat melihat sempitnya hak-hak pekerja dan kesempatan kerja, dikarenakan batasan kriteria lamaran bekerja yang membatasi umur, minimal pengalaman, dan lain-lain menyulitkan masyarakat untuk tetap produktif.

Puncak #KaburAjaDulu ada di bulan Februari 2025 menyangkut isu-isu yang ramai diperbincangkan, tagar ini di populerkan oleh @hrdbacot yang menulis, “Masa iya kita #KaburAjaDulu akan ke Vietnam? Berarti kan kita secara *development* negara, kita kebalap banget dong? Udah kebalap Malaysia, Singapura, sekarang Vietnam. Ini secara *Political Will* sebenarnya kita mau jadi apa? Kayak gak keliatan gitu *roadmap*-nya 2045 emas.” cuit nya di platform X, ini bukan sekadar keluhan remeh, melainkan sorotan tajam terhadap minimnya visi politik yang jelas dari pemerintah dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Kekhawatiran publik yang tersirat dalam tagar ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius mendengarkan aspirasi rakyat, melihat kondisi negara sedang tidak baik-baik saja (Abelia, Farah, Wibisono, Mahmud, & Raidar, 2025). Sayangnya, justru dengan lonjakan kebijakan yang kontroversial—seperti kenaikan PPN menjadi 12%, efisiensi anggaran yang membebani program MBG, pemangkasan anggaran beasiswa, kenaikan UKT mahasiswa, pengesahan pengurus Danantara yang dipersoalkan, hingga maraknya kasus korupsi serta pengesahan RUU TNI—keterputusan komunikasi pemerintah dengan masyarakat makin mencolok. Situasi ini menggambarkan kegagalan pemerintah dalam membangun *trust* dan transparansi, yang pada akhirnya menimbulkan skeptisme mendalam dari publik terhadap masa depan negara.



Tagar ini mendapat perhatian penuh, baik dari masyarakat untuk merefleksikan kekecewaan dan penekanan pada pemerintah Indonesia untuk lebih serius memperhatikan kesejahteraan masyarakat, serta bagi pemerintah sebagai bentuk panggilan dalam melakukan disrupsi undang-undang dan pengesahan lain yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat (Yuspita, 2025). Masyarakat memiliki hak bersuara untuk membantu tatanan hukum di Indonesia, sebagaimana asas demokrasi yang harusnya tetap berkembang, justru seolah dibungkam dengan rancangan yang akan segera di sahkan tanpa sepengetahuan masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang di rancang pula memicu kontroversi akan berpihak pada kebutuhan

elit pemerintah selama menjabat, sehingga mempersempit kesempatan masyarakat untuk berjuang di dalam negeri.

Seperti tayangan pada TV One yang memberikan forum diskusi terbuka pada beberapa pihak, antara lain Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, Yustinus Prastowo, Seniman dan Pengusaha Indonesia, Chiki Fauzi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, Pengamat Sosial Universitas Indonesia, Devi Rahmawati, dan Bang Pangeran Siahaan, mahasiswa UPN Veteran Jakarta, Isyarakhi Khoris Siregar, Viki Natasha, serta konten kreator Bunda Corla dengan tema Viral #KaburAjaDulu, Rasional atau Emosional?

Dimana forum diskusi tersebut membahas keresahan masyarakat yang tertuang pada #KaburAjaDulu untuk melihat substansi dan tujuan pembangunan bangsa yang tengah di terapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi kesejahteraan yang akan di ciptakan di Indonesia, serta tanggapan beberapa pihak yang merasa relevan dengan tagar tersebut. Hal ini dibahas karena beberapa pihak telah merasakan perbedaan yang mereka dapat ketika bekerja di luar negeri, terdapat ketimpangan kelayakan di Indonesia, contoh saja seperti upah rendah di luar negeri melebihi rata-rata gaji UMR daerah Indonesia, di luar negeri pekerjaan dengan jam yang ditentukan dan sesuai dengan kebutuhan.



Gambar 1.2 Diskusi Terbuka #KaburAjaDulu

Sumber: youtube tvOneNews.

Menanggapi peristiwa yang ramai mengenai #KaburAjaDulu, pemerintah justru terlihat lebih apatis, seolah gerakan media sosial ini tidak berdampak apa-apa terhadap kondisi di Indonesia kedepan nya, mereka jusru memberikan respon tidak konstruktif terhadap keadaan yang mengkhawatirkan kondisi Indonesia, jika keinginan untuk kabur dari Indonesia semakin meningkat, maka menyebabkan *brain drain* semakin besar. Sejalan dengan peristiwa ini, Widiastuti (2018) mengemukakan bahwa pemerintah memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan kebijakan dan informasi strategis. Namun, realitas terkini menunjukkan adanya inkonsistensi yang signifikan dalam pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sebagai alat komunikasi publik. Alih-alih menjadi media yang efektif dan terkelola dengan baik, pemerintah tampak gegabah dan kurang terencana dalam menangani komunikasi publiknya melalui platform tersebut.

Komunikasi publik pemerintah yang tidak merespon dengan pesan yang positif, bahkan terkesan keras terhadap aksi demonstran, justru memperkuat posisi tagar ini sebagai sarana kolektif bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan, mengkritik kebijakan, dan membangun ruang publik yang menantang dominasi komunikasi resmi pemerintah. mengandung pesan resistensi terhadap komunikasi pemerintah yang dianggap tidak responsif terhadap isu-isu penting di Indonesia (Farida & Sulistyawati, 2023).

Dilansir kompas.com, penggunaan tagar #KaburAjaDulu telah sampai dan direspon Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebennezer mengatakan, “Jika mau kabur, kabur saja lah, kalau perlu tidak usah kembali”, pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia juga menuturkan responnya terkait viral nya tagar ini, “Justru saya meragukan nasionalisme mereka yang kabur saja itu” dan respon Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan masyarakat yang bersuara bagaikan anjing yang menggonggong. Komunikasi yang tidak terbentuk arah dan maksud pengklarifikasi atau upaya membujuk masyarakat untuk percaya terhadap kabinet pemerintahannya, justru dinilai tidak peduli terhadap suara aspirasi masyarakatnya sendiri.

Dalam wawancara di YouTube bersama Najwa Shihab, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa selama 150 hari pertama masa kepemimpinannya, komunikasi publik pemerintah masih buruk dan perlu di evaluasi serta diperbaiki secara serius. Ia juga berjanji akan mengubah cara pemerintah menyampaikan informasi agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh opini yang tidak berdasar (Narasi, 2025). Kunto Adi Wibowo, Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Padjajaran, mengungkapkan pandangannya bahwa masalah komunikasi publik pemerintah sebenarnya diawali dari sikap pemerintah yang enggan menerima kritik dari masyarakat. Menurutnya, jika kritik hanya dianggap sebagai lelucon atau hal yang tidak serius, pemerintah tidak akan berusaha mendengarkan apalagi menjadikannya bagian penting dalam proses pemerintahan dan perkembangan demokrasi. Jelas nya dalam wawancara bersama Humas Indonesia, (Kunto Adi Wibowo, 2025).

Hal ini menjadi tantangan besar komunikasi publik pemerintah, mereka seharusnya membangun kepercayaan publik yang semakin rapuh. Morgan & Shelby D. Hunt, 1994 menekankan bahwa komitmen dan kepercayaan adalah fondasi utama dalam hubungan organisasi, termasuk antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang efektif harus bersifat terbuka, transparan, dan memberi ruang dialog konstruktif agar resistensi dapat diminimalisir dan partisipasi publik dapat diarahkan secara positif. Ketika komunikasi pemerintah tidak berjalan dengan baik, media sosial kerap menjadi ruang bagi resistensi yang lebih masif dan kritis, yang pada gilirannya dapat memperlemah legitimasi pemerintah.

Gerakan resistensi digital ini, yang dalam kajian Alfian dan Hamid disebut sebagai kliktivisme—aktivisme berbasis klik di media sosial—menjadi strategi baru masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah secara masif dan terorganisir. Kliktivisme memungkinkan masyarakat mengawasi, mengkritik, dan mendokumentasikan tindakan pemerintah, sekaligus memobilisasi opini publik demi perubahan sosial. Meskipun kliktivisme sering dikritik sebagai bentuk aktivisme yang minim risiko dan pengorbanan (*slacktivism*), akumulasi dukungan digital dalam jumlah besar dapat memberikan legitimasi politik yang signifikan dan

menjadi alternatif penting dalam mempromosikan gerakan sosial yang *anti-mainstream* (ALFIAN & HAMID, 2023).

Penggunaan tagar #KaburAjaDulu terus berkembang meskipun intensitasnya menurun dibandingkan puncaknya pada Februari lalu. Namun, semangat masyarakat, terutama generasi muda seperti Gen Z, untuk mewujudkan aspirasi di balik tagar ini justru semakin kuat. Masalah dalam penelitian ini adalah dimulainya dengan kebijakan dari pemerintah yang tidak memihak pada rakyat, ditambah respon pemerintah dalam menanggapi keresahan masyarakat yang disimbolkan dengan tagar #KaburAjaDulu memperlihatkan buruknya komunikasi publik pemerintah, yang semakin memantik kekecewaan masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk resistensi simbolik di media sosial, khususnya di platform X. Tagar tersebut telah bertransformasi menjadi ranah proaktif yang mendorong masyarakat untuk menuntut perhatian dan tindakan nyata dari pemerintah, terutama dalam hal pemberdayaan sosial-ekonomi. Keberhasilan tagar ini dalam menarik perhatian pengambil kebijakan, misalnya dengan munculnya usulan dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk menghapus batasan umur dalam penerimaan kerja, menunjukkan bahwa pergerakan ini tidak sekadar ekspresi digital semu, melainkan langkah konkret yang membuka ruang dialog dan reformasi. Ini menjadi indikasi bahwa suara kolektif masyarakat, melalui media sosial, mampu menembus birokrasi dan memicu perubahan kebijakan yang lebih inklusif (Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, 2025).

Dengan ramainya penggunaan tagar ini, maka untuk mendalami budaya masyarakat Indonesia menggunakan platform X sebagai aksi untuk melakukan resistensi terhadap pemerintah, penelitian ini dibuat untuk memperjelas posisi tagar ini di kalangan masyarakat. Bentuk-bentuk ujaran yang tercipta dalam *bubbles* dan *thread* platform X yang merujuk pada bentuk-bentuk pernyataan yang mengandung unsur resistensi akan dikumpulkan dalam penelitian yang memiliki lingkup penelitian di media online, seperti metode netnografi.

Pendekatan kualitatif netnografi menjadi metode yang tepat untuk menggali secara mendalam bagaimana keterlibatan publik melalui tagar #KaburAjaDulu berperan sebagai bentuk resistensi digital. Metode ini memungkinkan analisis

budaya pengguna online memberikan aksi terhadap suatu kebijakan, strategi komunikasi alternatif, dan dinamika interaksi sosial yang terjadi di ruang diskusi digital. Studi netnografi terhadap penggunaan tagar ini dapat mengungkap bagaimana netizen membangun makna kolektif dan mengorganisir resistensi yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan publik.

Tagar ini mengindikasikan bahwa media sosial bukan hanya sekadar ruang demokrasi digital yang ideal, tetapi juga medan pertempuran wacana yang sarat dengan konflik kepentingan, manipulasi opini, dan resistensi terhadap komunikasi pemerintah. Seperti kritik oleh Merlyna Lim dalam (Rianto, 2023) klaim bahwa media sosial meningkatkan partisipasi politik seringkali menyederhanakan persoalan dan mengabaikan realitas manipulasi opini publik dan propaganda terorganisasi yang meningkat, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian resistensi digital melalui tagar seperti #KaburAjaDulu juga harus mempertimbangkan dinamika kekuasaan, kontrol narasi, dan peran aktor-aktor politik dalam membentuk ruang publik digital.

Penggunaan tagar di media sosial, terutama di platform X, terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penting untuk melakukan penelitian mendalam terkait peristiwa tersebut. Salah satu tagar yang kini banyak dibicarakan adalah #KaburAjaDulu. Meski popularitasnya meningkat, belum banyak studi yang mengkaji secara kritis bagaimana tagar ini berperan sebagai bentuk resistensi, baik dari individu maupun masyarakat terhadap pemerintah. Tagar ini bukan sekadar tren online, melainkan cerminan nyata dari kegelisahan masyarakat yang merasa terjebak dalam situasi sosial-politik yang kompleks di Indonesia. Dengan demikian, penelitian yang fokus pada dimensi resistensi dalam penggunaan tagar ini menjadi sangat relevan untuk memahami suara-suara yang sering kali terpinggirkan dan bagaimana mereka menyuarakan ketidakpuasan mereka secara digital.

Penelitian ini hadir untuk memberikan validasi keberadaan tagar #KaburAjaDulu di platform X serta menjadi urgensi kritis untuk membantu pemerintah mengevaluasi dan mereformasi strategi komunikasinya, agar tercipta

dialog yang lebih humanis, responsif, dan inklusif demi menjaga stabilitas sosial, memperkuat citra pemerintahan, serta mencegah konflik yang merugikan semua pihak. Penelitian ini penting karena komunikasi publik pemerintah adalah kunci membangun kepercayaan dan legitimasi di masyarakat. Komunikasi yang efektif dan transparan memungkinkan pemerintah menyampaikan kebijakan dengan jelas dan menanggapi aspirasi publik secara terbuka, sehingga meningkatkan keterlibatan masyarakat.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlawanan simbolik yang muncul di platform X melalui tagar #KaburAjaDulu. Dengan pendekatan netnografi, studi ini menganalisis budaya resistensi yang terbentuk dalam tagar tersebut berdasarkan tiga postingan utama dan dua komentar pendukung pada masing-masing postingan oleh @primawansatrio, @berlianidris, dan @hrdbacot. Penelitian ini sekaligus menelaah awal mula kultur resistensi yang berkembang di platform X yang menjadi asal-usul keberadaan tagar ini.

1.3 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang penelitian ini yang membahas budaya masyarakat menggunakan tagar #KaburAjaDulu sebagai ekspresi ketidakpuasan dan kritik terhadap komunikasi publik pemerintah yang dirasa kurang responsif, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana tagar #KaburAjaDulu membentuk budaya netizen di platform X dalam menciptakan resistensi simbolik terhadap komunikasi publik pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat budaya yang diciptakan dalam penggunaan tagar #KaburAjaDulu di platform X untuk merefleksikan kekecewaan dan penolakan atas kebijakan-komunikasi publik pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat melalui media online, khususnya di platform X.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat yang diperoleh, antara lain manfaat teoritis, manfaat praktis, manfaat akademis, dan manfaat sosial.

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis untuk memperkaya kajian mengenai peran media sosial sebagai ruang publik digital dalam komunikasi dan resistensi sosial. Penelitian ini dikaji untuk menambah pemahaman teoritis pada partisipasi publik di platform X melalui tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk kritik terhadap komunikasi pemerintah, serta memperluas penerapan metode netnografi dalam analisis interaksi sosial di ruang digital. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi serta referensi studi lanjutan yang berhubungan dengan teknologi digital, budaya dalam berpartisipasi, dan perubahan sosial politik.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi masyarakat untuk menggunakan media sosial (khususnya platform X) agar lebih kritis, bijak, positif, dan konstruktif sebagai wadah dalam menyuarakan bentuk resistensi terhadap pemerintah melalui tagar #KaburAjaDulu untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

1.5.3 Manfaat Sosial

Penelitian ini diharapkan bisa membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi secara aktif di media sosial sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap pemerintah, dengan memahami penggunaan tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk resistensi, masyarakat mampu lebih kritis dalam berdialog secara digital. Penelitian ini mendorong terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan responsif antara pemerintah dan publik, untuk memperkuat budaya berpartisipasi dan berdemokrasi di era digital.

1.6 Batasan Penelitian

Penelitian ini menghadirkan konsep resistensi simbolik melalui tagar #KaburAjaDulu di platform X sebagai bentuk kritik apolitik terhadap komunikasi publik pemerintah yang buruk. Dengan metode netnografi, studi ini ingin menunjukkan bagaimana netizen menggunakan tagar sebagai medium strategi

resistensi sosial yang tersembunyi namun efektif dalam menekan legitimasi pemerintah secara digital. Temuan ini memperluas pemahaman pembentukan budaya resistensi simbolik dari konteks tradisional ke ranah media sosial modern, menyoroti peran penting budaya digital dalam perlawanan sosial kontemporer.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam struktur sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 penelitian ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang yang menjelaskan fenomena dari masalah yang ingin di teliti, di ikuti dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur dalam penulisan penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab 2 penelitian ini berisikan kajian pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, konsep penelitian, landasan teori yang digunakan untuk menjadi acuan penelitian, dan kerangka berpikir yang memberi gambaran mengenai alur dalam penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian Bab III penelitian ini menjelaskan pendekatan yang digunakan selama melakukan penelitian agar terstruktur dan terencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pada beberapa akun X untuk melihat engagement yang hadir memberikan interaksi pada platform digital, mencantumkan teknik pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis, serta jadwal penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ISI

Bab IV menjelaskan secara rinci penerapan pendekatan netnografi dalam menganalisis penggunaan tagar #KaburAjaDulu pada postingan representatif yang memiliki pesan resistensi simbolik, diperkuat dengan pernyataan komentar sebagai pendukung. Dalam pembahasan, untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, peneliti menyediakan data elisitasi dan *field note* dalam analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V mengintegrasikan hasil penelitian netnografi tentang budaya pengguna X dalam fenomena tagar #KaburAjaDulu pada 3 postingan representatif dan memilih 2 komentar dalam postingan yang dianggap relevan dalam konteks pembahasan melalui studi netnografi. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang relevan untuk memperbaiki komunikasi publik pemerintah agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat mencegah provokasi dari isu negatif. Di sisi lain, masyarakat diimbau untuk menjaga etika dalam menggunakan media sosial dan memanfaatkannya sebagai alat pengawasan yang penting saat ini.

